

Evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas

Baiq Endang Suprihartini^{1*}, Nur Radiah¹, Muhammad Wahyu Hidayat¹

¹ Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdatul Wathan Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/sjp.v3i1.128>

Article Info

Received : 2021-09-02

Revised : 2021-10-21

Accepted : 2022-02-08

Abstract: Pharmacy services is a direct service and obligation to the patients regarding the pharmacy substances with the aim to increase the public health services in the field of pharmacy. The purpose of this study is to evaluate the implementation of pharmaceutical standard at the primary health services Puskesmas. This study is conducted in descriptive research, data collection using a cross sectional survey approach. The instruments in this study was a questionnaire sourced from the Regulation of the Minister of Health No. 74 of 2016 concerning pharmaceutical service standards in Puskesmas. Respondents in this study were pharmacists at the Pagesangan Puskesmas. The management activities reach 100% of drug and medical consumables, 93.75% of equipment and supporting facilities, 100% of human resources. These results indicate that the evaluation of the implementation of pharmaceutical service standards at the Puskesmas based on pharmaceutical service indicators has been carried out well at the Pagesangan Puskesmas with an average value of 96.77%. The implementation of pharmaceutical service standards at the Pagesangan Puskesmas has met all the indicators of pharmaceutical service standards at the Puskesmas.

Keywords: Standard, Pharmacy services, Puskesmas

Citation: Suprihartini, B. E., Radiah, N., & Hidayat, M. W. (2022). Evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. *Sasambo Journal of Pharmacy*, 3(1), 1-5. <https://doi.org/10.29303/sjp.v3i1.128>

Pendahuluan

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian serta makin tingginya kesadaran masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan, maka dituntut kemampuan dan kecepatan para petugas kefarmasian dalam rangka mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Sebagai tolok ukur serta pedoman bagi tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan peraturan yaitu permenkes No. 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Standar ini berisikan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian ini diharapkan dapat

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga teknis kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan salah satu layanan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskandari adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi pada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi (*pharmaceutical care*) (Kementerian Kesehatan, 2016).

Email: endangantin@gmail.com (*Corresponding Author)

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan pelayanan kefarmasian di Puskesmas maupun pusat layanan kesehatan lainnya seperti apotik dan rumah sakit (Rohmah, 2018; Istiqomah dan Satibi, 2016; Capritasari dan Kurniawati, 2021). Penelitian yang dilakukan di salah satu Puskesmas di Kabupaten Magelang mendapatkan hasil yang baik (Rohmah, 2018). Penelitian di beberapa Puskesmas di Denpasar dan Yogyakarta juga mendapatkan hasil yang baik (Dewi dkk, 2020; Mangkoan, 2016). Namun, belum ada penelitian yang dilakukan di Puskesmas di wilayah kota Mataram.

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Puskesmas Pagesangan yang merupakan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di kota Mataram, dimana belum pernah dilakukan penelitian tentang Evaluasi Penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pagesangan. Puskesmas Pagesangan merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang berada kota Mataram yang letaknya cukup baik dan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*).

Metode dan Bahan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pengambilan sampel secara observasi langsung pada satu waktu saja (potong lintang). Subyek pada penelitian ini adalah seluruh tenaga kefarmasian baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di Puskesmas Pagesangan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner pada Apoteker/Tenaga Teknik Kefarmasian yang dilanjutkan dengan observasi secara langsung. Kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner tertutup yang di mana jawaban sudah tersedia di dalam kuesioner. Jumlah keseluruhan pertanyaan yang ada pada kuesioner dari masing-masing indikator yang diteliti sebanyak 31 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan diberi skor 0 jika dijawab "tidak" dan 1 jika dijawab "ya". Pelayanan kefarmasian dikategorikan baik jika skor antara 81-100%, cukup jika skor 61-80%, dan kurang jika <60%. Cara menghitung persentase skor adalah dengan membagi antara jumlah jawaban benar dengan jumlah seluruh jawaban di kali 100%.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* dengan membagi menjadi 3 indikator utama yaitu pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan dan fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia. Interpretasi hasil penelitian ini di buat dalam bentuk presentase dari masing-masing indikator

sebagai evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas di Pagesangan.

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian berdasarkan indikator kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis pakai di Puskesmas Pagesangan didapatkan sebesar 100%. Indikator ini menunjukkan hasil yang baik. Item lengkap dari seluruh pertanyaan pada indikator ini dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Berdasarkan data tentang peralatan dan fasilitas pendukung di Puskesmas Pagesangan hasilnya didapatkan 93,7%. Terdapat 1 fasilitas pendukung yang tidak tersedia yaitu ruang konseling. Data lengkap dapat dilihat di **Tabel 2**.

Berdasarkan Sumber Daya Manusia di Puskesmas Pagesangan didapatkan skor 100% (baik) karena sudah memiliki apoteker dan sudah mengikuti pelatihan pengelolaan obat. Data lengkap dapat di lihat pada **Tabel 3**.

Berdasarkan tiga indikator pelayanan farmasi di Puskesmas yang di gunakan dapat digambarkan rata-rata pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pagesangan sebesar 96,77%.

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi saat ini dimana revolusi industri 4.0 telah melanda seluruh dunia dan melanda seluruh sendi kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan (Kadriyan, 2019).

Salah satu cara mengukur kualitas pelayanan adalah dengan mengevaluasi pelayanan tersebut berdasarkan standar atau indikator tertentu. Evaluasi kualitas pelayanan kefarmasian dapat dilakukan dengan mengevaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di masing-masing sarana pelayanan kesehatan. Untuk Puskesmas standar yang digunakan adalah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan no. 74 tahun 2016 (Kementerian Kesehatan, 2016). Cara yang lain misalnya dengan melakukan analisis tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kefarmasian (Harpiani dkk, 2020).

Menurut Penelitian Rohmah dkk (2018) yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.74 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yg ada di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggung jawab kamar obat di Puskesmas cukup baik dengan persentase sebesar 50%, penunjang pelayanan di Puskesmas baik dengan persentase 100%, pelayan di Puskesmas baik dengan persentase 80,52%, penyerahan obat di Puskesmas cukup baik dengan

persentase 68,75%, mutu pelayanan di Puskesmas baik dengan persentase 86,7%, sehingga rata-rata pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Magelang di dapat kan persentase sebesar 71,5% yang berarti pelayan farmasi di Puskesmas Kota Magelang baik (Rohmah dkk, 2018).

Tabel 1. Hasil Indikator Penilaian Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

No	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Ya/Tidak
1	Melakukan perencanaan pengadaan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi, sediaan farmasi periode sebelumnya, data mutasi sediaan farmasi, dan rencana pengembangan.	Ya
2	Melakukan proses seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai pada daftar obat esensial nasional (DOEN) dan formularium nasional.	Ya
3	Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai menggunakan LPLPO	Ya
4	Melakukan pengecekan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diserahkan mencakup jumlah kemasan, jumlah sediaan farmasi, tanggal kadaluarsa dan bentuk sediaan farmasi.	Ya
5	Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di ajukan di dinaas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di daerah setempat.	Ya
6	Penyimpanan dan bahan medis pakai berdasarkan bentuk, jenis sediaan, suhu, cahaya, kelembapan, <i>fifo fefo</i> .	Ya
7	Obat narkotika dan psikotropika di simpan pada lemari khusus dua pintu dan dua lapis dengan kunci yang berbeda.	Ya
8	Pendistribusian ke sub unit di lakukan dengan cara pemberian obat sesuai resep yang diterima.	Ya
9	Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.	Ya
10	Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diterima, di simpan dan di distribusikan.	Ya
Total item		10
Persentase jawaban "Ya"		100

Hasil pada penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan penelitian yang terdahulu. Menurut analisa penulis, hal tersebut dapat terjadi karena penelitian oleh Rohmah dkk (2018) dilakukan pada tahap awal pemberlakuan peraturan tersebut, sedangkan pada penelitian ini peraturan tersebut telah tersosialisasi dengan baik.

Tabel 2. Hasil Indikator Penilaian Peralatan dan Fasilitas Pendukung

No	Peralatan dan Fasilitas Pendukung	Ya/Tidak
1	Memiliki ruang penyimpanan resep	Ya
2	Ruang penerimaan resep memiliki satu set meja dan kursi serta satu set computer	Ya
3	Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.	Ya
4	Memiliki ruang pelayanan resep dan peracikan	Ya
5	Memiliki lemari pendingin dan lemari obat khusus	Ya
6	Memiliki termometer ruangan	Ya
7	Memiliki blanko salinan resep	Ya
8	Memiliki etiket dan label obat	Ya
9	Memiliki wadah dan bahan pengemas obat	Ya
10	Memiliki catatan pelayanan resep	Ya
11	Memiliki buku-buku referensi/standar sesuai kebutuhan serta alat tulis	Ya
12	Memiliki cahaya dan sirkulasi udara yang cukup	Ya
13	Memiliki ruang penyerahan obat, buku pencatatan dan penyerahan obat.	Ya
14	Memiliki ruang konseling	Tidak
15	Memiliki lemari narkotika dan psikotropika	Ya
16	Memiliki ruang arsip.	Ya
Total		16
Persentase jawaban "Ya"		93,75

Standar pelayanan kefarmasian di 11 Puskesmas kota Denpasar telah mendapatkan kategori nilai yang baik, namun dari wawancara mengidentifikasi 18 faktor yang berpotensi terhadap ketidaksesuaian penerapan standar pelayanan baik pada sisi SDM, dana, sarana/material, dan metode (Dewi, 2020). Pada penelitian di Puskesmas Pagesangan hanya didapatkan ketidaksesuaian hanya pada ketidak-tersediaan ruang konseling.

Sejumlah 14 Puskesmas di Yogyakarta didapatkan penerapan yang menyuluruh dari standar pelayanan kefarmasian tetapi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan no 30 tahun 2014 (Mangkoan, 2016). Hasil ini hampir sama dengan penelitian yang di peroleh di Mataram walaupun dengan peraturan yang telah diperbaharui tahun 2016.

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotik, dapat dibandingkan dengan pelayanan di Puskesmas. Di Apotik di Sleman didapatkan Hasil penelitian berupa indikator yang terlaksana optimal oleh responden dari tujuh indikator sesuai peringkat persentase tertinggi, yaitu indikator ketenagaan dengan persentase skor 95,24%, faktor

pendukung sebesar 91,10%, dan pengelolaan obat sebesar 81,90%, sehingga ketiga indikator tersebut berkategori baik. Indikator pelayanan obat sebesar 78,70%, administrasi sebesar 77,62%, komunikasi, informasi, dan edukasi sebesar 76,80% dan evaluasi mutu pelayanan sebesar 71,29%, sehingga keempat indikator tersebut berkategori cukup. Berdasarkan 35 responden untuk keseluruhan indikator, hasil evaluasi implementasi standar pelayanan kefarmasian seluruhnya sebesar 65,71% berkategori baik, 31,43% berkategori cukup, dan hanya 2,86% berkategori kurang (Istiqomah dan Satibi, 2016).

Tabel 3. Hasil Indikator Penilaian Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Ya/Tidak
1	Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab	Ya
2	Memiliki tenaga teknis kefarmasian	Ya
3	Tenaga kefarmasian memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek.	Ya
4	Apoteker memiliki surat izin registrasi dan surat izin praktek.	Ya
5	Sudah mengikuti pelatihan pengelolaan obat	Ya
Total		5
Persentase jawaban "Ya"		100%

Bila dibandingkan dengan penelitian ini hasil yang diperoleh juga lebih baik dibandingkan hasil dari penelitian di apotik-apotik tersebut. Namun, hal ini dapat dipahami mengingat apotik merupakan sarana yang dapat dimiliki oleh perorangan sehingga variasinya sangat besar. Sedangkan Puskemas dimiliki oleh pemerintah sehingga pemenuhan kebutuhan sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana tentu lebih terjamin.

Tabel 4. Rata-Rata Hasil Presentase Setiap Indikator Pelayanan Kefarmasian

Indikator	Hasil (%)	Kategori
Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai.	100	Baik
Pelayanan dan fasilitas pendukung	93,75	Baik
Sumber daya manusia	100	Baik
Rata-rata	96,77	Baik

Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya dilakukan di 1 puskesmas di kota Mataram, sehingga hal ini tidak dapat menggambarkan keseluruhan kondisi implementasi peraturan Menteri Kesehatan ini di kota Mataram secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut,

penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan jumlah sampel Puskesmas yang lebih banyak.

Kesimpulan

Penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pagesangan sudah memenuhi semua indikator standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan no 74 tahun 2016.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp THT-KL(K), M.Kes atas asistensinya sehingga artikel ini bisa disusun dengan baik.

Daftar Pustaka

- Capritasari, R., & Kurniawati, D. R. (2021). Analisis perencanaan dan pengadaan guna menjamin ketersediaan obat di rumah sakit. *Sasambo Journal of Pharmacy*, 2(1), 32-36. <https://doi.org/10.29303/sjp.v2i1.71>
- Dewi, I. G. A. K., Parthasutema, I. A. M., & Putri, D. W. B. (2020). Gambaran dan kajian penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Denpasar berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. *Bali International Scientific Forum (BISF)*, 1(1).
- Harpiani, S., Puspitasari, C. E., Erwinayati, G. S., & Annisa, B. S. (2020). Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Kualitas Pelayanan Di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUDProvinsi NTBPeriode Maret-April 2019. *Sasambo Journal of Pharmacy*, 1(1), 17-21. <https://doi.org/10.29303/sjp.v1i1.9>
- Istiqomah, F. N., & Satibi. (2016). Evaluasi implementasi standar pelayanan kefarmasian oleh apoteker. *Jurnal JP Farmasi*. <https://www.e-jurnal.com/2018/07/evaluasi-implementasi-standar-pelayanan.html>.
- Kadriyan, H. (2019). *Pelayanan kesehatan telinga hidung tenggorok-kepala dan leher pada masa revolusi industri 4.0.: Refleksi dan studi kasus di NTB*. Mataram University Press. <http://eprints.unram.ac.id/15637/1/Pelayanan%20Kesehatan%20Telinga%20%20Hidung%20Tenggorokan-Kepala%20dan%20Leher%20pada%20Masa%20Revolusi%20Industri%204.0.pdf>

- Kementerian Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan no. 74 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- Mangkoan, M. (2016). *Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan no 30 tahun 2014 pada Puskesmas di Kota Yogyakarta*. [Skripsi, Universitas Sanata Dharma].
- Pereira, N. C., Luiza, V. L., Campos, M. R., & Chavez, L. A. (2021). Implementation of pharmaceutical services in Brazilian primary health care: A cross-sectional study. *BMC Family physician*, 22, 170. <https://doi.org/10.1186/s12875-021-01516-7>
- Prahasti, I. D. A. Y., Ekawanti, A., & Syamsun, A. (2014). Hubungan antara persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan dengan citra puskesmas di Kota Mataram. *Jurnal Kedokteran*, 3, 1. <http://jku.unram.ac.id/article/view/89>
- Rohmah, I. F. F., Dianita, P. S., & Latifah, E. (2018). Gambaran penerapan standar pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tegalrejo Kabupaten Magelang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016. [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang]. http://eprintslib.ummgl.ac.id/1825/2/15.0602.0016_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_D_AFTAR%20PUSTAKA.pdf